

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri

**Edisi Triwulan I
Tahun 2011**



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

KATA PENGANTAR

Buku Ringkasan Eksekutif Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri ini merupakan pelaksanaan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Diharapkan Ringkasan Eksekutif ini dapat memberi gambaran ringkas mengenai pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri yang meliputi daftar proyek, realisasi penarikan termasuk deskripsi permasalahan dan tindak lanjutnya. Di dalamnya dilaporkan pula pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri berdasarkan jenis pinjaman untuk masing-masing *development partner* meliputi pinjaman program, pinjaman proyek dan pinjaman proyek yang diteruspinjamkan (*Subsidiary Loan Agreement*).

Pada edisi Triwulan I Tahun Anggaran 2011 ini proyek pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on-going*) yang dipantau pelaksanaannya berjumlah 158 proyek terdiri dari 1 pinjaman program, 130 pinjaman proyek, dan 27 pinjaman proyek yang diteruspinjamkan (*Subsidiary Loan Agreement*). Total nilai pinjaman sampai dengan Triwulan I TA 2011 adalah sebesar USD 20,1 milyar, sedangkan penyerapan kumulatif mencapai USD 10,9 milyar.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek antara lain berkaitan dengan proses pelelangan (*tender*) yang relatif lama akibat kurangnya pemahaman dari pengelola proyek, proses pembebasan tanah yang berlarut-larut, dan masalah lain terutama terkait dengan pengelolaan proyek seperti lemahnya koordinasi antara instansi pelaksana di pusat dan dengan pemerintah daerah.

Dari hasil rapat pemantauan proyek-proyek pinjaman luar negeri Triwulan I TA 2011 diketahui terdapat usulan pembatalan pinjaman (*cancellation*) sebesar USD 22,6 juta.

Semoga buku Ringkasan Eksekutif ini dapat memberikan gambaran awal secara cepat dan ringkas mengenai kinerja pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas

Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA

RINGKASAN EKSEKUTIF

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2011 (Posisi 31 Maret 2011)

I. Gambaran Umum

Proyek-proyek pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya sampai dengan akhir Maret 2011 berjumlah 158 proyek dengan nilai total sebesar USD 20,1 milyar terdiri dari 1 pinjaman program dengan nilai USD 100,1 juta, 130 pinjaman proyek dengan nilai USD 15,0 milyar dan 27 pinjaman yang di-SLA-kan dengan nilai USD 5,0 milyar.

Penarikan kumulatif sampai dengan 31 Maret 2011 adalah sebesar USD 10,9 milyar atau 54,4% dari total nilai pinjaman, sehingga total dana yang belum ditarik adalah sebesar USD 9,2 milyar. Realisasi penarikan pada Tahun Anggaran berjalan periode Januari – Maret 2011 mencapai USD 591,4 juta atau 15,4% terhadap target penarikan Tahun Anggaran 2011 sebesar USD 3,8 milyar. Realisasi penarikan ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penarikan pada periode yang sama di tahun 2010 yang mencapai 22,9%.

Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Per 31 Maret 2011

(dalam juta USD)

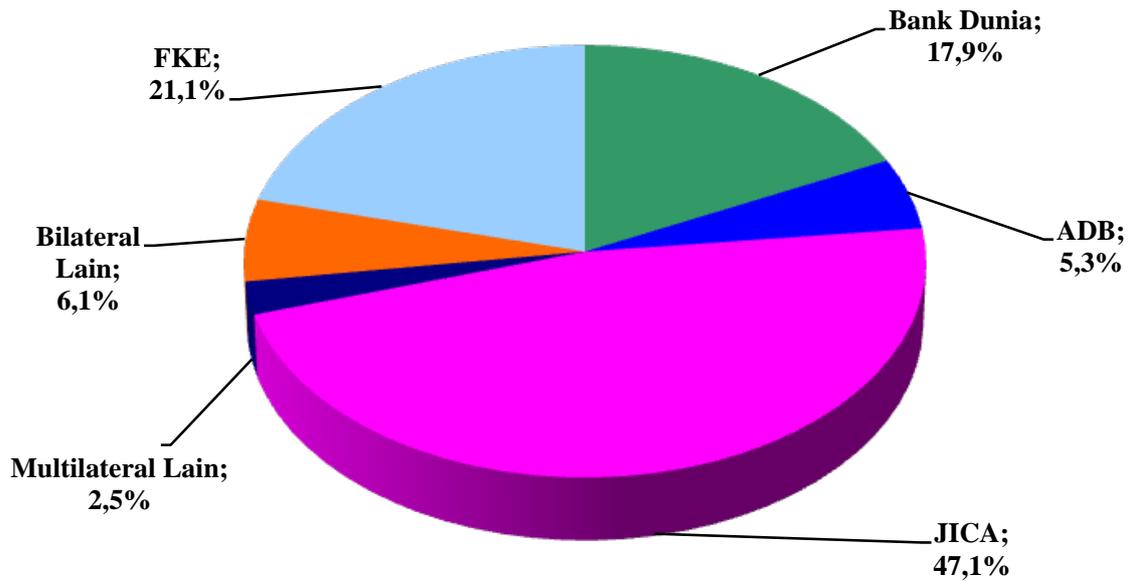
No.	Pinjaman	Jumlah Program/ Proyek	Jumlah Pinjaman	Penarikan Kumulatif		Pinjaman belum ditarik	TA 2011		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	Pinjaman program	1	100,1	100,1	100,0	0,0	100,1	100,1	100,0
2	Pinjaman Proyek	130	15.031,3	8.012,5	53,3	7.018,8	2.726,9	429,8	15,8
3	Pinjaman yang di-SLA-kan	27	4.963,7	2.824,0	56,9	2.139,7	1.006,8	61,5	6,1
	Total	158	20.095,1	10.936,6	54,4	9.158,5	3.833,8	591,4	15,4

Sumber : LKPPPLN Edisi Triwulan I Tahun 2011

Komposisi pinjaman luar negeri yang dibiayai Bank Dunia, ADB, JICA, Multilateral lain, Bilateral lain dan Fasilitas Kredit Ekspor yang sedang berjalan sampai dengan bulan Maret 2011 dapat dilihat pada diagram 1.

Dari diagram 1 berikut terlihat bahwa sumber pinjaman luar negeri terbesar berasal dari JICA yang mencapai 47,1% dari total pinjaman luar negeri yang sedang berjalan, kemudian FKE 21,1%; Bank Dunia 17,9%; Bilateral Lain 6,1%; ADB 5,3%, dan Multilateral Lain 2,5%.

Diagram 1. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Triwulan I TA 2011



1.1 Pinjaman Program

Pada Triwulan I tahun 2011, realisasi penarikan pinjaman program yang bersumber dari JICA di lingkup Kementerian Keuangan pada tahun anggaran berjalan periode Januari-Maret 2011 sebesar USD 100,1 juta telah terserap seluruhnya (100%).

Tabel 2. Status Penarikan Pinjaman Program Triwulan I TA 2011

(dalam juta USD)

No.	Pemberi Pinjaman	Jumlah Program	Jumlah Pinjaman	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2011		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	JICA	1	100,1	100,1	100,0	0,0	100,1	100,1	100,0
	Total	1	100,1	100,1	100,0	0,0	100,1	100,1	100,0

Sumber : LKPPPLN Edisi Triwulan I Tahun 2011

1.2 Pinjaman Proyek yang Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga

Pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang sedang berjalan sampai dengan Triwulan I TA 2011 berjumlah 130 pinjaman proyek. Pinjaman tersebut berasal dari Bank Dunia sebanyak 21 pinjaman proyek, ADB 18 pinjaman proyek, JICA 37 pinjaman proyek, Multilateral Lain 13 pinjaman proyek terdiri dari 11 pinjaman proyek bersumber dari *Islamic Development Bank* (IDB) dan 2 pinjaman proyek dari IFAD, Bilateral Lain 15 pinjaman proyek (meliputi pinjaman dari Australia, Belanda, Belgia, China, Jerman, Korea, Perancis, dan Spanyol), dan proyek-proyek yang dibiayai dari Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) sebanyak 26 proyek.

Realisasi penarikan kumulatif pinjaman proyek sampai dengan Triwulan I TA 2011 mencapai USD 8,0 milyar atau 53,3% dari total pinjaman proyek sebesar USD 15,0 milyar. Sedangkan realisasi penarikan pinjaman proyek pada Tahun Anggaran berjalan periode Januari - Maret 2011 mencapai USD 429,8 juta atau 15,8% dari yang ditargetkan

pada Tahun Anggaran 2011, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini. Realisasi penarikan pinjaman proyek ini lebih rendah jika dibandingkan realisasi penarikan pinjaman proyek pada periode yang sama pada tahun 2010 yaitu mencapai 23,8%.

Dilihat dari asal/sumber pemberi pinjaman, sampai dengan Triwulan I TA 2011 ini penarikan dana pinjaman proyek yang bersumber dari FKE menempati posisi yang paling rendah dengan hanya menyerap 4,2%, sedangkan penarikan dana pinjaman proyek terbesar bersumber dari Bank Dunia sekitar 45,9% dari target tahun 2011.

Tabel 3. Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek sampai dengan Triwulan I TA 2011

(dalam juta USD)

No	Pemberi Pinjaman	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penarikan TA 2011		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	Bank Dunia	21	3.352,2	2.475,9	73,9	876,4	453,3	208,3	45,9
2	ADB	18	770,8	398,9	51,8	371,9	199,8	51,3	25,7
3	JICA	37	5.685,7	1.956,0	34,4	3.729,7	897,4	106,6	11,9
4	Multilateral Lain	13	493,1	178,4	36,2	314,8	107,4	12,9	12,0
5	Bilateral Lain	15	932,2	317,5	34,1	614,5	280,9	17,3	6,2
6	FKE	26	3.797,4 ^{*)}	2.685,9	70,7	1.111,5	788,1	33,4	4,2
	Total	130	15.031,4	8.012,6	53,3	7.018,8	2.726,9	429,8	15,8

Sumber : LKPPPLN Edisi Triwulan I Tahun 2011

^{*)} alokasi kredit ekspor

Catatan:

- Untuk pinjaman JICA, Multilateral Lain, Bilateral Lain merupakan equivalen dalam USD
- Multilateral Lain : Islamic Development Bank dan IFAD
- Bilateral Lain: Australia, Belanda, Belgia, China, Jerman, Korea, Perancis, dan Spanyol

1.3 Pinjaman Proyek yang di-SLA-kan

Pinjaman proyek yang dilaksanakan melalui mekanisme SLA (*subsidiary loan agreement*) atau diteruspinjaman yang dipantau pelaksanaannya sampai dengan Triwulan I TA 2011 berjumlah 27 pinjaman proyek. Sebanyak 27 pinjaman proyek yang di SLA kan tersebut, yang dikelola oleh PT. PLN sebanyak 24 proyek yang terdiri atas 2 proyek bersumber dari Bank Dunia, 2 proyek dibiayai ADB, 12 proyek dari pinjaman JICA, 1 proyek dari pinjaman Belgia, 1 proyek dari pinjaman Perancis dan Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) sebanyak 6 pinjaman proyek yang di SLA kan. Sedangkan pinjaman proyek yang di SLA-kan lainnya yaitu 2 proyek dikelola oleh PT. PGN yang bersumber dari Bank Dunia sebanyak 1 proyek, pinjaman JICA sebanyak 1 proyek dan sisanya 1 proyek dikelola oleh PT. Merpati Nusantara Airlines dengan pinjaman yang bersumber dari China.

Jumlah pinjaman proyek yang di-SLA-kan sampai dengan posisi bulan Maret tahun 2011 mencapai USD 5,0 milyar, dengan penarikan kumulatif mencapai USD 2,8 milyar. Sedangkan realisasi penarikan pada Tahun Anggaran berjalan periode Januari - Maret 2011 mencapai USD 61,5 juta atau 6,1% dari target penarikan TA 2011 sebesar USD 1,0 milyar sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 menunjukkan bahwa prosentase penarikan pinjaman proyek yang di-SLA-kan pada tahun anggaran berjalan periode Januari – Maret 2011 yang dibiayai dari Kredit Ekspor dan Bilateral Lain belum terserap sama sekali atau 0,0%. Sementara prosentase

penarikan pinjaman proyek SLA dari ADB relatif lebih tinggi bila dibandingkan lembaga pemberi pinjaman lainnya.

Tabel 4. Status Penarikan Pinjaman Proyek yang di-SLA-kan Triwulan I TA 2011

(dalam juta USD)

No.	Pemberi Pinjaman	Jumlah Program /Proyek	Jumlah Pinjaman	Penarikan Kumulatif		Pinjaman belum ditarik	Penarikan TA 2011		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1.	Bank Dunia	3	251,0	180,7	72,0	70,3	42,0	1,2	2,8
2.	ADB	2	301,0	148,3	49,3	152,7	165,4	20,7	12,5
3.	JICA	13	3.675,3	2.043,0	55,6	1.632,3	606,9	39,6	6,5
4.	Bilateral Lain	3	299,7	232,1	77,4	67,6	22,0	0,0	0,0
5.	FKE	6	436,7	219,9	50,4	216,8	170,5	0,0	0,0
Total		27	4.963,7	2.824,0	56,9	2.139,7	1.006,8	61,5	6,1

Sumber : LKPPPLN Edisi Triwulan I Tahun 2011

Catatan:

- Pinjaman JICA, Multilateral Lain, Bilateral Lain merupakan ekivalen dalam USD

II. Kinerja Pelaksanaan

2.1 Kinerja Pelaksanaan per Kementerian/Lembaga

Pada Triwulan I TA 2011 diidentifikasi terdapat 20 kementerian/ lembaga yang menjadi instansi penanggung jawab (*executing agency*) atas 158 proyek. Dari Tabel 5 terlihat bahwa sebagian besar proyek berada di 5 kementerian/ lembaga yaitu sebanyak 39 proyek berada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, 22 proyek berada di Kementerian Pertahanan, 15 proyek berada di Kementerian Perhubungan, 12 proyek berada di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan mengelola 10 proyek. Sedangkan pinjaman proyek yang di-SLA-kan sebagian besar dikelola oleh PT.PLN yaitu sebanyak 24 proyek.

Realisasi penarikan pinjaman proyek tertinggi pada tahun anggaran berjalan dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri yang menarik 91,8% dari target penarikan pinjamannya, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar 42,0%, dan Kementerian Negara PPN/Bappenas sebesar 17,7%. Sedangkan penarikan terendah berasal dari Kementerian Pertanian, Kepolisian RI, Kementerian PDT dan Lemhanas belum menarik sama sekali atau 0,0% dari target penarikannya di TA 2011.

Tabel 5. Kinerja Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Menurut Instansi Penanggungjawab Per 31 Maret 2011

(dalam juta USD)

No	Instansi Penanggungjawab	Jumlah Proyek/ Program	Jumlah Pinjaman	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penarikan TA 2011		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
A.	Kementerian/Lembaga	131	15.131,4	8.112,6	53,6	7.018,8	2.827,0	529,9	18,7
1.	Kementerian Pekerjaan Umum	39	5.271,3	2.625,7	49,8	2.645,6	840,5	142,9	17,0
2.	Kementerian Pertanian	3	131,4	63,6	48,4	67,7	21,4	0,0	0,0
3.	Kementerian Pendidikan Nasional	12	851,9	321,1	37,7	530,8	238,8	29,7	12,4
4.	Kementerian Dalam Negeri	5	1.478,6	1.255,0	84,9	223,6	184,2	169,2	91,8
5.	Kementerian Perhubungan	15	2.224,2	482,0	21,7	1.742,2	337,0	20,1	6,0
6.	Kementerian Kesehatan	10	328,2	122,4	37,3	205,8	104,7	9,4	9,0
7.	Kementerian Agama	6	184,5	103,4	56,0	81,1	66,7	8,9	13,4
8.	Kementerian Keuangan								
	- Pinjaman proyek	2	170,0	36,1	21,2	133,9	46,6	0,3	0,6
	- Pinjaman program	1	100,1	100,1	100,0	0,0	100,1	100,1	100,0
9.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5	201,6	129,5	64,2	72,1	38,8	6,2	16,0
10.	Bappenas	2	145,5	56,2	38,6	89,3	17,7	3,1	17,7
11.	Kementerian Pertahanan	22	2.988,1	2.439,6	81,6	548,5	603,8	33,4	5,5
12.	Kementerian Kominfo	1	35,1	4,9	14,0	30,2	8,4	3,5	42,0
13.	Kepolisian RI	4	809,3	246,3	30,4	563,0	184,3	0,0	0,0
14.	Kementerian PDT	1	104,8	97,2	92,7	7,6	5,4	0,0	0,0
15.	Bakosurtanal	1	76,9	14,2	18,5	62,7	24,2	2,9	12,2
16.	Badan Kepegawaian Negara	1	19,4	15,3	79,2	4,0	3,8	0,1	3,4
17.	Lemhanas	1	10,5	0,0	0,0	10,5	0,3	0,0	0,0
B.	SLA	27	4.963,7	2.824,0	56,9	2.139,7	1.006,8	61,5	6,1
18.	PT. PLN	24	4.059,1	1.966,5	48,4	2.092,5	984,1	59,6	6,1
19.	PT. PGN	2	672,6	625,4	93,0	47,2	22,7	1,9	8,3
20.	PT. Merpati Nusantara Airlines	1	232,0	232,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Jumlah Pinjaman Proyek</i>	157	19.995,0	10.836,5	54,2	9.158,5	3.733,7	491,3	13,2
	<i>Jumlah Pinjaman Program</i>	1	100,1	100,1	100,0	0,0	100,1	100,1	100,0
	Total	158	20.095,1	10.936,6	54,4	9.158,5	3.833,8	591,4	15,4

Sumber: LKPPPLN Edisi Triwulan I TA 2011

2.2 Progres Varian (PV)

Kinerja pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri, selain diukur berdasarkan realisasi penarikan pinjaman terhadap target pinjaman pada tahun anggaran berjalan, diukur pula berdasarkan besarnya angka progres varian. Angka progres varian didapat dari selisih antara persentase penarikan kumulatif dengan persentase waktu pinjaman yang sudah terpakai. Angka progres varian positif menunjukkan penarikan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan, sedangkan angka negatif menunjukkan hal sebaliknya. Suatu proyek dikatakan mengalami keterlambatan yang cukup signifikan apabila nilai progres variannya kurang dari atau sama dengan -30 (≤ -30).

Tabel 6 memperlihatkan 41 pinjaman proyek yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan. Sebagian besar keterlambatan itu berasal dari pinjaman JICA sebanyak 14 proyek, Bilateral Lain sebanyak 8 proyek, ADB sebanyak 7 proyek, Multilateral Lain sebanyak 7 proyek, FKE sebanyak 4 proyek dan Bank Dunia sebanyak 1 proyek.

Tabel 6. Proyek-Proyek Pinjaman dengan Progres Varian \leq -30

No	Instansi Penanggung Jawab>Nama Proyek	Kreditur	Progres Varian
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM			
1.	4834-IND Strategic Road Infrastructure Project	Bank Dunia	-42,4
2.	2500-INO Integrated Citarum WRMP	ADB	-33,9
3.	IP-523 Komering Irrigation Project Stage Phase II	JICA	-36,8
4.	IP-528 North Java Corridor Flyover Project	JICA	-41,6
5.	IP-529 Tanjung Priok Acces Road Construction Project I	JICA	-52,6
6.	IP-531 Tanjung Priok Acces Road Construction Project II	JICA	-60,3
7.	AIPRD-L-002 Eastern Indonesia National Road Improvement	Australia	-37,6
8.	EDCF INA-11 Manado By-Pass Project Phase II	Korea	-38,8
KEMENTERIAN PERTANIAN			
9.	IND-0125 The Post Tsunami Rehab of Agric. Infra. In NAD	IDB	-62,9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL			
10.	IND-0114/0115 The North Sumatera University Hospital	IDB	-31,0
11.	IND-129/130 Development an Upgrading of The State University of Jakarta	IDB	-54,2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI			
12.	1964-INO (SF) Sustainable Cap Building for Decentralization	ADB	-37,9
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN			
13.	IP-521 The Urgent Rehab.Project of Tj. Priok	JICA	-61,5
14.	IP-508 Railway Electrification and DD Tracking Project 1	JICA	-84,1
15.	IP-536 E/S Jakarta Mass Rapid Transit System	JICA	-30,3
16.	IP-540 Railway DT on Java South Line III	JICA	-56,4
17.	IP-548 Double Track Cirebon-Kroya Phase I & III	JICA	-34,9
18.	2002 66 973 Jabotabek Commuter Railways	Jerman	-47,8
KEMENTERIAN KESEHATAN			
19.	2163-INO Comm. Water Services & Health Project	ADB	-55,4
20.	2164-INO (SF) Comm. Water Services & Health Project	ADB	-55,7
21.	2002 70 413 The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital	Jerman	-53,0
22.	INA-10 Strengthening of Teaching Hospital	Korea	-100,0
23.	INA-14 Improvement Of H Adam Malik in Medan	Korea	-73,6
24.	INA-15 Upgrading of Prof. Dr. Kandaou Hospital in Manado	Korea	-78,9
KEMENTERIAN KOMINFO			
25.	IP-542 ICT Utilization Project for Educational Quality Enh.	JICA	-34,1
KEMENTERIAN AGAMA			
26.	IND-0064 Magnet School in Aceh Timur	IDB	-38,3
27.	IND-0112/0113 The Reconstruction of IAIN Ar Raniry	IDB	-59,9
28.	IND-0126/0127 Upgrading & Dev of The SIU of S. Gunung Djati	IDB	-75,6
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
29.	IND-0121 Dev't of Belawan and Sibolga Fishing Port	IDB	-39,7
BAPPENAS			
30.	2264-INO (SF) Infrastructure Reform Sector Dev. Project	ADB	-58,2
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA			
31.	KE-POLRI-9 Alokasi KE TA 2008 / POLRI	FKE	-57,7
32.	KE-POLRI-10 Alokasi KE TA 2009 / POLRI	FKE	-49,9
PT. PLN			
33.	1982-INO Renewable Energy Development	ADB	-30,6
34.	1983-INO Power Transmission Improvement	ADB	-58,4
35.	IP-516 Semarang PP Rehab & Gasfication	JICA	-72,0
36.	IP-525 Ulubelu Geothermal Power Plant Construction III	JICA	-60,6

No	Instansi Penanggung Jawab>Nama Proyek	Kreditur	Progres Varian
37.	IP-527 Keramasan Power Plant Extension Project	JICA	-53,4
38.	IP-532 Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III	JICA	-30,0
39.	BEF-003 Scattered Containerized Diesel Power Proj. In Riau,Maluku,Papua	Belgia	-72,6
40.	JBIC CLA-3 Rehabilitation PLTU Suralaya Lot 1 - Boiler (4 X 400 MW)	FKE	-62,8
41.	JBIC CLA-4 Rehabilitation & Modernization of Paiton SPP 1	FKE	-39,6

Sumber: LKPPPLN Edisi Triwulan I TA 2011

III. Permasalahan Pelaksanaan

Keterlambatan dalam pelaksanaan ada proyek-proyek pinjaman luar negeri umumnya menyangkut masalah-masalah sebagai berikut:

- (1) **Pengadaan barang/jasa**, lamanya proses tender atau terjadinya *retender* sehingga seluruh atau sebagian paket belum dapat terkontrak seperti pada proyek **Bank Dunia**: 4744-IND *Second Eastern Indonesia Region transport*, 4834-IND *Strategic Road Infrastructure Project*, 4789-IND *IMHERE*, 7631-IND *Project for Indonesian Tax Administration Reform* dan 7730-IND *Urban Water Supply and Sanitation Project*; **JICA**: IP-529 *Tanjung Priok Access Road Construction Project I*, IP-521 *The Urgent Rehab Project of Tanjung Priok Port*, IP-508 *Railway Electrification and DD Tracking Project I*, IP-540 *Railway DT on Java South Line III*, IP-548 *Double Track Cirebon-Kroya Phase I & III*, IP-516 *Semarang PP Rehab & Gasfication*, IP-527 *Keramasan Power Plant Extension Project*; **ADB**: 2500/2501-INO *Integrated Citarum WRMP*, 2654-INO *Metropolitan Sanitation Management Health Project*, 2416-INO *Vocational Education Strenthening Project*, 2348-INO *Nutrition Improvement through Community Empowerment*, 2264-INO *Infrastructure Reform Sector Development Project*, 1982 *Renewable Energy Development*, 1983 *Power Transmission Improvement*; **IDB**: IND-0125 *The Post Tsunami Rehabilitation of Agriculture Infrastructure in NAD*, IND-0114/0115 *The North Sumatera University Hospital*, IND-129/130 *The Development and Upgrading of State University*, IND-0112/0113 *The Reconstruction of IAIN Ar Raniry*, IND-0126/0127 *Upgrading & Development of the SIU of Sunan Gunung Djati*, IND-0121 *Development of Belawan and Sibolga Fishing Port*; **Korea**: EDCF INA-11 *Manado By-Pass Project Phase II*, INA-10 *Strengthening of Teaching Hospital*, INA-14 *Improvement of Adam Malik Hospital in Medan* dan **Australia**: AIPRD-L-002 *Eastern Indonesia National Road Improvement*, 2002 66 973 *Jabotabek Commuter Railways*.
- (2) Terkait dengan **No Objection Letter (NOL)** dari *lender*, proses penerbitan NOL relatif lama seperti pada proyek **Bank Dunia**: 4834-IND *Strategic Road Infrastructure Project*, 7631-ID *Project for Indonesian Tax Administration Reform*; **ADB**: 2500/2501-INO *Integrated Citarum WRMP*, 2575-INO *Rural Infrastructure Support-PNPM 2*, 2127-INO *STAR Development Project*; **IDB**: IND-0126/0127 *Upgrading & Development of The SIU of S. Gunung Djati*; **Jerman**: nomor pinjaman 2004 66 383 *Improvement of Dr. Wahidin Sudiro Husodo Hospital*, dan **Korea**: INA-14 *Improvement of Adam Malik Hospital in Medan*.
- (3) Terkait dengan **proses penerbitan dokumen anggaran (DIPA)** serta **kekurangan alokasi dana DIPA** sehingga ada kegiatan yang tertunda seperti pada proyek **Bank Dunia**: 7669-IND *Dam Operational Improvement and Safety Project*, 4834-IND *Strategic Road Infrastructure Project*; **ADB**: 2064/2065-INO *Participatory Irrigation Sector Project*, 2074/2075-INO *Decentralized Health Services*, 2294

Madrasah Education Project, 2285 Sustainable Aquaculture Development for Food Security; JICA: IP-489 Railway DT of Cikampek-Cirebon (II); IDB: IND-0064 Magnet School in Aceh Timur, IND-133 Development of Belawan Port Phase I.

- (4) Lemahnya **manajemen dan koordinasi**, masih terjadi pada proyek-proyek yang dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dengan instansi lain maupun dengan pemerintah daerah seperti pada proyek **Bank Dunia: 4834-IND Strategic Road Infrastructure Project, 7669-IND Dam Operational Improvement and Safety Project, 7631-ID Project for Indonesian Tax Administration Reform, 4664-IND Urban Poverty II; JICA: IP-523 Komerling Irrigation Project Stage Phase II, IP-528 North Java Corridor Flyover Project, IP-531 Tanjung Priok Acces Road Construction Project II, IP-544 National Geo-Spatial Data Infrastructure Development, IP-542 ICT Utilization Project for Educational Quality Enh, IP-525 Ulubelu Geothermal Power Plant Construction III; ADB: 2163/2164-INO Community Water Services and Health Project.**
- (5) Masalah **pembebasan lahan** yang membutuhkan waktu lama sehingga pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal semula. Secara umum masalah pengadaan/pembebasan lahan terjadi pada proyek-proyek pembangunan jalan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, seperti pada proyek pinjaman dari **JICA: IP-523 Komerling Irrigation Project Stage Phase II, IP-534 Integrated Water Resources & Flood Management, IP-529 Tanjung Priok Access Road Construction Project I dan IP-531 Tanjung Priok Access Road Construction Project II.** Masalah ini juga terjadi pada proyek-proyek Kementerian Perhubungan, seperti pada proyek pinjaman dari **JICA: IP-508 Railway Electrification and DD Tracking Project 1** dan pada PT. PLN, seperti pada proyek pinjaman dari JICA yaitu **IP-525 Ulubelu Geothermal Power Plant Construction III** dan **ADB** yaitu **2500/2501-INO Integrated Citarum WRMP, 1983-INO Power Transmission Improvement.**
- (6) **Backlog** yang membebani rekening pemerintah (penggunaan dana talangan Pemerintah dalam rangka penarikan pinjaman melalui Rekening Khusus yang belum dimintakan dan/atau belum mendapatkan penggantian dan/atau tidak mendapatkan penggantian dari pemberi pinjaman). *Backlog* ini umumnya terjadi akibat belum dipenuhinya syarat-syarat administrasi untuk pencairan dana pinjaman, seperti terjadi pada proyek **Bank Dunia** yaitu **4384-IND National Program for Community Empowerment** dan terjadi pada proyek **ADB** yaitu **2064/2065-INO Participatory Irrigation Sector Project, 2348-INO Nutrition Improvement through Community Empowerment, 2163/2164-INO Community Water Resource & Sanitation Health, dan 2294-INO Madrasah Education Project.**

IV. Langkah Tindak Lanjut

Telah dilakukan langkah tindak lanjut penyelesaian terhadap permasalahan tersebut di atas, antara lain: melaksanakan rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan pihak proyek, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah terkait maupun *lender* dan menyampaikan secara tertulis surat teguran dalam rangka mengingatkan percepatan pelaksanaan proyek. Selain itu beberapa langkah tindak lanjut yang perlu segera dilakukan adalah:

1. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan *guideline* yang berlaku, sehingga lamanya proses tender, pelaksanaan re-tender serta ketidaklengkapan dokumen tender dapat dihindari. Selain itu, perlu ada *updating project cost* yang mencakup *updating procurement plan* dan *disbursement plan* hingga akhir masa laku pinjaman, sehingga setiap keterlambatan pelaksanaan perkembangan proyek ke depan dapat diantisipasi lebih cepat.
2. Berkoordinasi dengan *lender* perihal penerbitan *No Objection Letter* dan melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan NOL. Kelengkapan dokumen ini perlu menjadi perhatian, karena proses penerbitan NOL pada beberapa *lender* tidak dilakukan di kantor perwakilan *lender* di Indonesia, tetapi membutuhkan persetujuan dari kantor pusat yang berada di luar negeri yang membutuhkan waktu lebih lama.
3. Berkoordinasi dengan pihak pelaksana di daerah, *implementing agency*, intern kementerian/lembaga dan Kementerian Keuangan dalam hal perencanaan kebutuhan pendanaan, pengalokasian dan penerbitan DIPA. Koordinasi dengan pihak-pihak tersebut dibutuhkan, sehingga kebutuhan dana pinjaman yang tepat di tahun anggaran berjalan dan kepastian pencantuman alokasi dana dalam DIPA dapat dipastikan. Pelaksanaan *updating project cost* pun akan membantu dalam meng-*exercise* kebutuhan pendanaan hingga akhir masa laku pinjaman. Dengan begitu, proses revisi DIPA dapat diminimalisir. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan diperlukan dalam hal penerbitan DIPA.
4. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun lintas instansi (terutama untuk pinjaman yang memiliki banyak *implementing agency*) dengan mengadakan pertemuan rutin terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan proyek.
5. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki lahan tersebut dan memastikan bahwa lahan-lahan yang sudah dibebaskan tidak ditempati kembali. Selain itu, pembentukan tim yang khusus menangani pembebasan lahan, seperti P2T (panitia pembebasan tanah), dapat mempercepat proses pembebasan lahan.
6. Menyelesaikan permasalahan *backlog* dengan mengumpulkan berbagai dokumen/bukti, seperti SP2D, agar pengeluaran dapat segera ditagihkan kepada *lender*. Proses pengumpulan dokumen/bukti pengeluaran yang seringkali menjadi masalah, khususnya untuk pinjaman-pinjaman yang dilaksanakan di banyak daerah, dapat diatasi dengan melakukan jadwal rekonsiliasi secara rutin atau melaksanakan pengumpulan dokumen/bukti melalui jaringan internet atau secara *on-line*.

Diharapkan langkah-langkah tindak lanjut tersebut dapat segera mengarah pada percepatan pelaksanaan agar target penyelesaian proyek dapat tercapai dan dapat dijadikan suatu referensi apabila terjadi permasalahan yang sama pada proyek lain yang sejenis di masa mendatang.

V. Pembatalan Sebagian Pinjaman

Berdasarkan hasil rapat pemantauan Triwulan I TA 2011 telah diidentifikasi adanya pembatalan 2 (dua) pinjaman proyek yang nilainya mencapai USD 22,6 juta sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 7. Kedua pinjaman proyek tersebut (4744-IND dan 4786-IND) di

lingkup Kementerian Pekerjaan Umum telah disetujui oleh Bank Dunia untuk pembatalan sebagian pinjamannya. Sedangkan pinjaman proyek 4810-IND di lingkup PT. PGN telah diusulkan ke Bank Dunia untuk dilakukan pembatalan sebagian pinjaman sebesar USD 10,0 juta.

Tabel 7. Pembatalan Sebagian Pinjaman

(dalam juta USD)

No	Instansi Penanggungjawab>Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Penutupan	Jumlah Pembatalan Pinjaman
	Kementerian Pekerjaan Umum			
1.	4744-IND Second Eastern Indonesia Region Transport	23/10/2004	30/09/2011	6,0
2.	4786-IND Urban Sector Development Reform Project	31/01/2006	30/06/2012	6,6
	Subtotal			12,6
	PT. PGN			
3.	4810-IND Domestic Gas Market Development Project	03/04/2006	31/03/2014	10,0
	Subtotal			10,0
	Total			22,6

Sumber: LKPPPLN Edisi Triwulan I TA 2011